

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes*. Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp> pada 21 Oktober 2022 pukul 21.45 WIB.
- BPKP. (2020). *Siskeudes Bisa Tangkal Penyelewengan Dana Desa*. Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/berita/read/26749/0/Siskeudes-Bisa-Tangkal-Penyelewengan-Dana-Desa>, pada 20 Oktober 2022 pada 21 Oktober 2022 pukul 22.40 WIB
- BPKP. (2022). *261 Desa di Kabupaten Boyolali Telah Implementasikan Siskeudes*. Diakses dari laman <https://www.bpkp.go.id/berita/readunit/24/35632/0/261-Desa-di-Kabupaten-Boyolali-Telah-Implementasikan-Siskeudes> pada 5 Oktober 2022 pukul 15.55 WIB.
- Budiarjo, Miriam. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cressey, D. (1953). Other people's money, dalam: "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen et al. 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance*. Vol. 13 h. 53-81.
- Dewi, N.K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298.
- Dispermasdesdukcapil (2020). *Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19*. Diakses dari laman resmi <https://dispermasdesdukcapil.jatengprov.go.id> pada 26 Maret 2024 pukul 16.20 WIB.
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment.
- Dwipayana, AAGN. (2003). *Membangun Good Governance*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadjon, P. M. (1998). *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- H. R. Ridwan. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ifrani, I. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Luar Biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.
- Infoplus. (2018). *Kades Teras Boyolali Didakwa Pungli IMB PT Adi Propertindo Rp 177 Juta*. Diakses dari laman <https://infoplus.id/2018/05/02/kades-teras-boyolali-didakwa-pungli-imb-pt-adi-propertindo-rp-177-juta/> pada 5 Oktober 2022 pukul 12.20 WIB.
- Jeacklin V., Harijanto., & Hendrik G., (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). vol.5, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.

- Katz, Ellen. (2004). *Transparancy in Government: How American Citizen Influence Public Policy*. *Journal of Accountancy*.
- Kompas. (2021). *ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa perlu Diawasi Ketat*. Diakses dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-des-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-des-perlu-diawasi> pada 20 Oktober 2022 pukul 22.40 WIB.
- Kurnianto, S., Kurniawansyah, D., & Ekasari, W. F. (2019). Menilai Keberhasilan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes): Validasi Model Keberhasilan Sistem Informasi Delone Dan Mclean. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(2), 687-706.
- Moleong, L., (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtar, M., Hamidi, N., & Susanti, A. D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 4(1).
- Murtiono, Y., & Wulandari. (2014). *Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Nawawi, H., & Hadari M., (2006). *Instrumen Penelitian dalam Bidang Sosial*. Pontianak: Gajah Mada University Press.
- Pemkab Boyolali. 2023. *Selenggarakan Bimtek Desa Anti Korupsi, KPK Harap Berawal dari Desa Bisa Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi*. Diakses dari laman <https://boyolali.go.id/news/selenggarakan-bimtek-des-anti-korupsi-kpk-harap-berawal-dari-des-bisa-wujudkan-indonesia-bebas-korupsi> pada 24 Januari 2024 pukul 17.00 WIB.
- Pemprov Jateng. 2021. *Boyolali Tiga Kali Berturut-turut Raih Skor Pencegahan Korupsi Tertinggi*. Diakses dari laman resmi <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/boyolali-tiga-kali-berturutan-raih-skor-pencegahan-korupsi-tertinggi/> pada 12 Desember 2022 pukul 11.44 WIB.
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100.
- Satori, D., & Komariah, A., (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, E. M., & Kollip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Solopos. *Asale Desa Teras dan Perjalanan Ki Ageng Pandanaran*. Diakses dari laman resmi <https://soloraya.solopos.com/asale-des-teras-boyolali-dan->

[perjalanan-ki-ageng-pandan-arang-1080653](#) pada 4 Desember 2023 pukul 11.20 WIB.

- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta.
- Sululing, S. (2017). Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa sebagai Salah Satu Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ekonomi*, 22(2). 314-332.
- Syafrudin, A. (2000). “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Wang, J., Lee, G., & Crumbley, D. L. (2016). Current Availability of Forensic Accounting Education and State of Forensic Accounting Services in Hong Kong and Mainland China. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*, 8(3), 515–534.
- Welley, M. M., dkk. (2021). Perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(4), 79-91.
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152-165.
- Wilma, A., & Hapsari, A. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perspektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.
- Yusran L., (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Jakarta: Penerbit Rmbooks.

Peraturan dan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali No. 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes).
- Peraturan Bupati (Perbup) Boyolali No. 59 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bagian Kedua Pasal 3 sampai Pasal 8.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.